

PENTINGNYA INTEGRITAS PEMIMPIN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)

Oleh :

Abdi Tanjung, S.Pd., MM

(Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan)

Email : Abditanjung.1992@gmail.com

Astrak

Penelitian berjudul Pentingnya Integritas Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Di Kota Padangsidimpuan dan Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan) penelitian inibertujuan : (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Padangsidimpuan dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penegakan Hukum oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan Bagi Pemimpin yang Melakukan tindak Pidana Korupsi. (3) Untuk Mengetahui Pengaruh Integritas Pimpinan dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Kota Padangsidimpuan dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Penelitian ini di laksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan Analisis data dengan menggunakan Regresi dengan bantuan program SPSS Persi 22. Berdasarkan olah data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :Variabel Integritas Pemimpin, memberikan pengaruh secara positif tapi tidak signifikan terhadap Pemberantasan Korupsi di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan) dengan nilai t_{hitung} 1.343 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari alpha ($0,188 > 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan H_0 diterima dan H_a ditolak. untuk itu Peningkatan Integritas Pimpinan jika ditingkatkan akan dapat mengurangi Terjadinya Praktek Korupsi yang ada di Kota Padangsidimpuan pada umumnya, Khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan

Kata Kunci : Integritas Pemimpin, Pemberantasan Korupsi dan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Otonomi dan desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada satu sisi, otonomi daerah telah memberikan andil bagi peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Atas nama otonomi daerah, terjadi transformasi politik dan penyebaran kekuasaan yang tidak hanya terpusat seperti di kala Orde Baru, melainkan merambah ke daerah-daerah dengan kewenangan yang dimiliki Bupati/Walikota di wilayah kabupaten dan kota. Melalui otonomi

daerah, para kepala daerah dapat leluasa menentukan kebijakan publiknya dalam mendorong roda perekonomian dan menggairahkan geliat investasi di daerah.

Melihat kenyataan ini, reformasi seolah hanya menjadi fase yang menandai semakin buruknya kinerja pemerintahan Indonesia secara khusus dan kinerja masyarakat Indonesia secara umum dalam upaya pembasmian korupsi. Namun begitu, dibalik kondisi miris di atas, sebenarnya tersirat sejumlah jawaban dan harapan baru terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Contoh adalah dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, KPK menjadi salah satu yang terdepan dalam upaya pembasmian korupsi di Indonesia.

Reformasi turut memberikan jawaban atas permasalahan korupsi yang ada dalam bentuk lain, misalnya aspek keterbukaan. Saat ini, kita dapat dengan mudah mencari informasi tentang pemerintahan kita lewat berbagai saluran. Bagaimana pemerintahan kita menjalankan tugas yang diembannya pun dapat kita pantau dengan mudah seiring makin mudahnya mengakses informasi di zaman keterbukaan ini. Hal tersebut termasuk kita dapat melihat perilaku keseharian dari para abdi negara kita, mulai dari level Pimpinan hingga staf. Kita pun dapat mengambil

teladan yang baik dari Pimpinan kita, selain dari keteladanan yang telah diberikan oleh para pendahulu kita.

Sejalan dengan kerangka kebijakan desentralisasi yang menempatkan para tokoh pemimpin daerah dalam posisi makin penting, inisiatif tokoh daerah dalam upaya pencegahan korupsi perlu terus digali. Keprihatinan dari banyak pihak sekarang ini adalah bahwa justru para politisi daerah itu yang memberi contoh buruk dengan berbagai bentuk perilaku korup. Laporan mutakhir dari KPPOD mengenai Pungli (pungutan liar) menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden pelaku usaha di daerah menunjuk pihak birokrasi sebagai aktor utama, disusul organisasi masyarakat/kepemudaan, aparat keamanan dan preman jalanan (Bisnis Indonesia, 02-03-2007). Oleh karena itu, publikasi Tempo (02-02-2009) yang memberi penghargaan kepada sepuluh orang Bupati dan Walikota terbaik di Indonesia dengan kriteria pokok bersih dari korupsi patut dihargai dan bisa dijadikan sebagai acuan bagi upaya lebih lanjut di masa yang akan datang

Dalam hal ini, penulis akan mencoba mengulas pentingnya integritas pemimpin dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan pemerintah dikota padangsidmpuan. Dikarenakan aspek integritas ini merupakan hal yang begitu dekat dengan keseharian kita, diharapkan juga integritas masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan dalam upayanya membasmi korupsi (selain dari aspek pemberantasan korupsi yang lain). Selain itu Tulisan ini bermaksud menguraikan beberapa inisiatif dari tokoh daerah dalam upaya mengurangi korupsi. Di tengah begitu banyaknya kepala daerah yang bermasalah karena penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kendatipun jumlahnya masih terlalu sedikit inisiatif-inisiatif tersebut perlu terus dikembangkan agar selanjutnya menjadi petunjuk kebijakan dan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Korupsi

Secara umum korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi

itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

2.2 Dampak Negatif dari Korupsi

Sebagaimana kita ketahui korupsi itu adalah perbuatan yang sangat buruk atau tidak baik, jika dibiarkan tanpa ada pencegahan maka akan berdampak negatif pada sisi Demokrasi, Ekonomi dan kesejahteraan umum negara.

Pertama, dampak bagi demokrasi adalah Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Kedua, dampak bagi Ekonomi adalah Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi

juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Ketiga, dampaknya bagi Kesejahteraan umum negara adalah Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

2.3 Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Dalam upaya pencegahan tindak pidana dan fenomena terjadinya praktek korupsi di setiap daerah, banyak indikator dan berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu sektor publik legislatif, eksekutif dan yudikatif dan juga sudah menjamur pada sektor swasta dan pejabat asing.

Pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun daerah. Sebagaimana kita ketahui legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen (parliament) yang menekankan unsur bicara (parler) dan merundingkan, kongres, dan asembli nasional(assembly) yang mengutamakan unsur berkumpul. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif.

2.4 Integritas Pimpinan

Secara umum Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk dan alasannya.

Pemimpin berasal dari kata asing *leader* dan Pimpinan *leadership*, Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas.

Integritas seorang Pemimpin dan masyarakat dalam upaya Membasmi Korupsi Reformasi, Antikorupsi dan Keteladanan Semenjak bergulirnya reformasi, ada kecenderungan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Selama 14 tahun perjalanan reformasi, korupsi malah makin

merebak di banyak sisi, menimpa ke semua jenjang jabatan, merambah dari bawah hingga ke atas, menerpa semua bidang, dan merasuki semua lembaga pemerintahan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setiap tahun, sekitar 40% anggaran pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah diselewengkan. Hal ini sungguh miris mengingat sektor pemerintahan seharusnya menjadi pionir pemberi keteladanan dalam upaya pembasmi korupsi. Nyatanya? Sektor pemerintahan malah menjadi yang terdepan dalam memberi contoh bagaimana korupsi harus dilaksanakan demi sebesar-besarnya manfaat kepada diri sendiri dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Lima praktik keteladanan pemimpin dalam konteks keteladanan pemimpin, Kouzes dan Posner (2007) menyatakan ada lima praktik keteladanan, yaitu mencontohkan cara (Model the Way), menginspirasi visi bersama (Inspire a Shared Vision), menantang proses (Challenge the Process), memampukan orang lain untuk bertindak (Enable Others to Act), dan menyemangati jiwa (Encourage the Heart) .

Dalam kaitannya dengan model the way Kouzes dan Posner berpandangan bahwa memimpin berarti bahwa anda harus menjadi contoh yang baik, dan mewujudkan apa yang anda katakan. Gelar yang dimiliki seseorang merupakan pemberian, akan tetapi kehormatan hanya dapat dicapai melalui tingkah laku seseorang . Kouzes dan Posner mengatakan bahwa perbuatan pemimpin jauh lebih penting dari perkataannya. Pemimpin harus menunjukkan contoh terlebih dahulu dalam tindakan sehari-hari dan mempertunjukkan komitmen yang mendalam atas apa yang diyakininya. "Pimpinan contoh" sangat cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan Integritas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, suatu penelitian yang baik harus jelas metode yang dipergunakan. Kejelasan metode dapat memberi gambaran yang jelas kepada pembaca tentang data-data yang akan di ambil oleh penulis. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno surachmad yaitu :

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misal untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara utama itu dipergunakan setelah penulis memperhitungkan kewajiban dan tujuan penyelidikan (Surachmad. 200)

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua

variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode asosiatif yakni untuk menjelaskan dan mencari gambaran tentang kedua variabel tersebut, dengan pendekatan korelasional yaitu :

Variabel X : Integritas Pemimpin

Variabel Y : Korupsi

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam bentuk korelasional. Seiring dengan itu Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa : " Penelitian korelasional juga dapat digunakan untuk menggeneralisasikan hipotesis karena itu koefisien atau pengaruh yang dihasilkan menunjukkan tingkat signifikan terbukti tidaknya sebuah hipotesis dalam penelitian" (Arikunto,2013)

4. HASIL PENELITIAN

Dari pengolahan data terhadap hasil jawaban responden dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil uji reliabilitas untuk kuisioner masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1 : Frekuensi Jawaban Responden berdasarkan nilai Mean, Median, Standar Deviasi, varians Nilai maksimum Dan Minimum Variabel Pimpinan terhadap Korupsi Statistics

		Pimpinan	Korupsi
N	Valid	40	40
	Missing	0	0
Mean		47.3250	49.4000
Median		48.0000	48.5000
Mode		50.00	47.00
Std. Deviation		5.398	5.58294
Variance		29.148	31.169
Range		26.00	19.00
Minimum		32.00	41.00
Maximum		58.00	60.00

sumber : Lampiran Print out SPSS 20 Uji Validitas Variabel Integritas Pimpinan (x)

Variabel	Nilai <i>Person correlation</i>	n=40, t tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.923	0.297	Valid
Pertanyaan 2	0.708	0.297	Valid
Pertanyaan 3	0.589	0.297	Valid
Pertanyaan 4	2.071	0.297	Valid
Pertanyaan 5	0.820	0.297	Valid
Pertanyaan 6	0.862	0.297	Valid
Pertanyaan 7	0.640	0.297	Valid
Pertanyaan 8	0.692	0.297	Valid
Pertanyaan 9	0.446	0.297	Valid
Pertanyaan 10	0.815	0.297	Valid

sumber : Lampiran Print out SPSS 20

Dari tabel diatas setelah dilakukan lagi uji terhadap validitas terhadap item pertanyaan

variabel Integritas Pemimpin yang digunakan dalam penelitian ini dan terbukti seluruh item pertanyaan yang digunakan adalah valid sebab nilai r_{hitung} yang terlihat diatas dari semua item pertanyaan lebih besar dibanding $>$ nilai kritis (r_{tabel}) pada $= 0,05 = n \text{ person correlation } 40$ adalah sebesar 0.297. Selanjutnya Variabel Motivasi (X_2), dari 10 pertanyaan, tidak terdapat item pertanyaan yang tidak valid, sehingga item pernyataan dapat dilanjutkan dalam pengujian.

Uji Validitas Variabel Korupsi (y)

Variabel	Nilai <i>Person correlation</i>	n=40, <i>Person correlation</i> Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,695	0.297	Valid
Pertanyaan 2	0,500	0.297	Valid
Pertanyaan 3	0,615	0.297	Valid
Pertanyaan 4	0,522	0.297	Valid
Pertanyaan 5	0,333	0.297	Valid
Pertanyaan 6	0,538	0.297	Valid
Pertanyaan 7	0,430	0.297	Valid
Pertanyaan 8	0,610	0.297	Valid
Pertanyaan 9	0,507	0.297	Valid
Pertanyaan 10	0,472	0.297	Valid

sumber : Lampiran Print out SPSS 20

Dari tabel diatas setelah dilakukan uji terhadap validitas terhadap item pertanyaan variabel tentang Korupsi yang digunakan dalam penelitian ini terbukti item pertanyaan yang digunakan adalah item yang valid dan tidak ada yang tidak valid. dikeluarkan dalam penelitian ini. sebab nilai r_{hitung} yang terlihat diatas dari semua item pertanyaan nilai yang dihasilkan lebih besar dibanding $>$ nilai kritis (r_{tabel}) pada $= 0,05 = n \text{ person correlation } 40$ adalah sebesar 0.297.

4.4 Uji Reliabilitas

Dari pengolahan data terhadap hasil jawaban responden dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil uji reliabilitas untuk kuisioner masing-masing variabel (Y, X) seperti terlihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner

No.	Variabel	Koefisien Alpha	Nilai Kritis (= 0,05)	Keterangan
1	Integritas Pimpinan	0.881	0,6	Reliabel
2	Korupsi	0.688	0,6	Reliabel

Ternyata dari hasil pengolahan data yang disajikan dalam Tabel 4.13 di atas, dapat diungkapkan bahwa kuisioner-kuisioner semua variabel (Y,X) ternyata reliabel atau dapat dipercaya, sebab semua koefisien reliabilitas alpha kecil dari standard item alphanya atau koefisien reliabilitas alpha jauh lebih besar dari nilai $Conbarrrch = 0.60$ pada $= 0,05$ dengan

criteria sangat tinggi. Dengan demikian kuisioner masing-masing variabel (baik variabel bebas maupun variabel tak bebas) dari penelitian ini dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya.

Regresi Integritas Pimpinan serta Pengaruhnya Terhadap Korupsi.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.976	7.040		3.122	.004
	Pimpinan	.228	.170	.221	1.343	.188

Berdasarkan tabel 4.10 di atas Pentingnya Integritas Kepemimpinan X terhadap Korupsi (Y), terlihat nilai t_{hitung} 1.343 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari alpha ($0,188 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan “Pentingnya Integritas Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Di Kota Padangsidempuan dan Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan) “ *ditolak*”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang Pentingnya Integritas Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Di Kota Padangsidempuan dan Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan) Berdasarkan olah data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Variabel Integritas Pemimpin, memberikan pengaruh secara positif tapi tidak signifikan terhadap Pemberantasan Korupsi di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan) dengan nilai t_{hitung} 1.343 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari alpha ($0,188 > 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan H_0 diterima dan H_a ditolak. untuk itu Pentingnya Integritas Pimpinan jika ditingkatkan akan dapat mengurangi Terjadinya Praktek Korupsi yang ada di Kota Padangsidempuan pada umumnya, Khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka untuk Mengurangi Korupsi di Kota Padangsidempuan Khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : Bagi Pimpinan; untuk dapat meningkatkan Pentingnya Kejujuran bagi setiap

Pimpinan dalam mengemban tugas, serta memberikan arahan-arahan dalam melaksanakan tugas yang lebih baik dan bermanfaat demi mengurangi terjadinya praktek korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH., Leonard S. Tindangen, SH, MH, Cobi E. Mamahit, SH, MH 2 NIM. 00711064. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media : Malang

Sudjana dan Ibrahim. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Winarno, Surakhmad. 2000. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik Bandung* : Tarsito

Yogi Suwarno, 2006. *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI: Jakarta

Yatno Isworo. 2008. *Percepatan Pemberantasan Korupsi*. Badan Diklat Pemprov Jawa Tengah.